

DETERMINASI ASIMETRI INFORMASI DALAM PENGENDALIAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH: PERSPEKTIF EKONOMI KELEMBAGAAN DI KOTA CILEGON

Purnama Fidyah Handayani¹, Anti Wulan Agustini²
purnamafdyh01@gmail.com¹, antyaugustini@gmail.com²
Universitas Bina Bangsa

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan penjadwalan produksi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi pada PT. Nikomas Gemilang. Penjadwalan produksi memiliki peranan penting dalam menentukan urutan pekerjaan, mengalokasikan sumber daya produksi, serta memastikan bahwa kegiatan produksi dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif melalui kegiatan observasi, pengumpulan data, serta diskusi dengan pihak terkait di lingkungan produksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penjadwalan produksi yang diterapkan pada perusahaan telah berjalan dengan cukup baik, namun masih terdapat beberapa kendala seperti keterlambatan penyediaan bahan baku, perubahan permintaan produksi, serta ketidakseimbangan beban kerja pada beberapa bagian produksi. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kelancaran proses produksi dan pencapaian target produksi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi, perencanaan, serta pengawasan kegiatan produksi guna mendukung sistem penjadwalan produksi yang lebih optimal.

Kata Kunci: Penjadwalan Produksi, Evaluasi Produksi, Efisiensi Produksi, Industri Manufaktur.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of production scheduling in order to improve the effectiveness and efficiency of the production process at PT. Nikomas Gemilang. Production scheduling plays an important role in determining the sequence of work, allocating resources, and ensuring that production activities run according to the predetermined plan. The method used in this study is a descriptive approach through observation, data collection, and discussions with related parties in the production environment. The results indicate that the production scheduling system implemented has generally been carried out properly, but several obstacles are still found, such as delays in the availability of raw materials, changes in production demand, and imbalances in workload across several production sections. These conditions can affect the smoothness of the production process and the achievement of production targets. Therefore, improvements in coordination, planning, and monitoring of production activities are needed to support a more optimal production scheduling system.

Keywords: Production Scheduling, Production Evaluation, Production Efficiency, Manufacturing Industry.

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kebijakan pembangunan yang terencana. Pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, serta penguatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan suatu sistem pengelolaan dan pengendalian yang efektif agar setiap program pembangunan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Pengendalian program pembangunan daerah merupakan bagian penting dalam

proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengendalian tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah telah berjalan sesuai dengan rencana, anggaran, serta target yang telah ditetapkan. Selain itu, pengendalian juga berfungsi untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program pembangunan serta meningkatkan akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat.

Menurut (Daerah, Mardiasmo, 2002), menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan dan program pembangunan daerah harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif agar mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta memperkuat efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan program Pembangunan. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan program pembangunan daerah seringkali menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya adalah adanya asimetri informasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya.

Asimetri informasi merupakan kondisi dimana terdapat ketidakseimbangan informasi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya sehingga salah satu pihak memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pihak lainnya. Dalam konteks pemerintahan daerah, pemerintah sebagai penyelenggara program pembangunan biasanya memiliki informasi yang lebih lengkap mengenai proses perencanaan, penganggaran, maupun pelaksanaan program pembangunan. Sementara itu, masyarakat sebagai penerima manfaat program seringkali memiliki keterbatasan dalam mengakses informasi tersebut. Kondisi ini dapat menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pembangunan serta berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

Menurut (Widodo, J, 2001), transparansi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu prinsip penting untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis dan akuntabel. Keterbukaan pada informasi memungkinkan masyarakat untuk mengetahui serta mengawasi jalannya pemerintahan sehingga dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam upaya memahami permasalahan asimetri informasi dalam pembangunan daerah, pendekatan ekonomi kelembagaan menjadi salah satu perspektif yang relevan untuk digunakan. Ekonomi kelembagaan menekankan pentingnya peran institusi atau kelembagaan dalam mengatur hubungan antara pemerintah, masyarakat, serta berbagai aktor pembangunan lainnya. Kelembagaan pembangunan daerah memiliki peran penting dalam mengatur berbagai aktivitas pembangunan agar dapat berjalan secara efektif dan efisien (Arsyad, L., 2010).

Kelembagaan yang kuat akan mampu menciptakan sistem koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah serta meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan. Namun demikian, dalam praktiknya implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, koordinasi antar lembaga pemerintah yang belum optimal, serta keterbatasan akses informasi bagi masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan asimetri informasi masih menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas pengendalian program pembangunan daerah.

Kota Cilegon sebagai salah satu kota industri di Provinsi Banten memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional maupun nasional. Keberadaan berbagai industri besar di wilayah ini menjadikan Kota Cilegon sebagai

pusat aktivitas ekonomi yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kota Cilegon terus berupaya melaksanakan berbagai program pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan informasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya. Kesenjangan informasi ini dapat mempengaruhi efektivitas pengendalian program pembangunan daerah karena proses pengawasan dan evaluasi program menjadi kurang optimal. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa asimetri informasi merupakan salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi efektivitas pengendalian program pembangunan daerah. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya asimetri informasi dalam pengendalian program pembangunan daerah, khususnya dalam perspektif ekonomi kelembagaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinasi asimetri informasi dalam pengendalian program pembangunan daerah dengan menggunakan perspektif ekonomi kelembagaan di Kota Cilegon. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran kelembagaan dalam mengurangi kesenjangan informasi serta meningkatkan efektivitas pengendalian program pembangunan daerah. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi informasi, memperkuat sistem pengawasan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini ialah dengan menggunakan metode penyuluhan dan diskusi partisipatif. Metode penyuluhan dilakukan dengan memberikan pemaparan materi mengenai pentingnya transparansi informasi dan pengendalian program pembangunan daerah untuk mengurangi terjadinya asimetri informasi. Melalui penyuluhan ini diharapkan peserta kegiatan dapat memahami konsep dasar asimetri informasi serta pentingnya keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut (Mardikanto, T, 2010), menyatakan bahwa penyuluhan merupakan proses pendidikan nonformal yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat sehingga mereka mampu memahami serta memecahkan permasalahan yang dihadapi. Dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, penyuluhan menjadi salah satu metode yang efektif untuk menyampaikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat secara langsung. Selain itu, kegiatan pengabdian juga menggunakan metode diskusi partisipatif yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada peserta dalam menyampaikan pendapat, pengalaman, serta permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan program pembangunan daerah.

Diskusi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta serta mendorong partisipasi aktif dalam proses pengawasan pembangunan. Menurut (Dwiyanto, A, 2006), menyatakan bahwasannya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan adanya partisipasi masyarakat, proses pengawasan terhadap kebijakan dan program pemerintah dapat berjalan lebih efektif sehingga dapat meminimalkan terjadinya kesenjangan informasi antara

pemerintah dengan masyarakat.

Dengan menggunakan metode penyuluhan dan diskusi partisipatif tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah dan masyarakat mengenai pentingnya transparansi informasi dalam pengendalian program pembangunan daerah serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman mengenai asimetri informasi dalam pengendalian program pembangunan daerah menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap pentingnya transparansi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kegiatan ini diikuti oleh aparatur pemerintah daerah serta masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan program pembangunan daerah di Kota Cilegon.

Berdasarkan hasil kegiatan penyuluhan dan diskusi yang telah dilaksanakan, diketahui bahwa sebagian peserta sebelumnya belum memahami secara menyeluruh mengenai konsep asimetri informasi serta dampaknya terhadap efektivitas pengendalian program pembangunan daerah. Setelah dilakukan penyampaian materi dan diskusi interaktif, peserta mulai memahami bahwa ketidakseimbangan informasi antara pemerintah dan masyarakat dapat mempengaruhi proses pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, transparansi informasi merupakan salah satu unsur penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Transportasi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi jalannya pemerintahan secara lebih efektif (Sedarmayanti, 2012). Keterbukaan informasi tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih akuntabel.

Hasil kegiatan pengabdian juga menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pembangunan masih perlu ditingkatkan. Sebagian peserta menyampaikan bahwa masyarakat seringkali tidak memiliki akses yang cukup terhadap informasi mengenai program pembangunan daerah, seperti informasi mengenai perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, maupun penggunaan anggaran pembangunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan informasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat.

Menurut (Kumorotomo, W, 2005), menyatakan bahwasannya dengan keterbukaan informasi publik ini merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat akuntabilitas pemerintah. Ketika masyarakat memiliki akses yang cukup terhadap informasi publik, maka masyarakat dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Selain itu, dalam kegiatan diskusi juga terungkap bahwa koordinasi antar lembaga pemerintah memiliki peran penting dalam pengendalian program pembangunan daerah. Koordinasi yang kurang optimal dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan penyampaian informasi serta ketidaksesuaian data antara satu instansi dengan instansi lainnya. Kondisi ini dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah. Koordinasi merupakan proses pengintegrasian berbagai kegiatan dalam organisasi agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif dan efisien (Siagian, S. P, 2004).

Dengan melalui kegiatan penyuluhan dan diskusi yang dilakukan, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya keterbukaan informasi serta peran masyarakat dalam proses pengawasan pembangunan.

Selain itu, kegiatan pengabdian ini juga memberikan ruang bagi peserta untuk berbagi pengalaman serta mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program pembangunan daerah. Melalui proses diskusi tersebut, diperoleh berbagai masukan yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi informasi serta memperkuat sistem pengendalian program pembangunan.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah dan masyarakat mengenai pentingnya transparansi informasi, partisipasi masyarakat, serta koordinasi kelembagaan dalam pengendalian program pembangunan daerah. Upaya tersebut diharapkan dapat membantu meminimalkan terjadinya asimetri informasi serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan daerah di Kota Cilegon.

KESIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman aparatur pemerintah daerah dan masyarakat mengenai asimetri informasi dalam pengendalian program pembangunan daerah masih perlu ditingkatkan. Sebelum kegiatan dilaksanakan, sebagian peserta belum memahami secara menyeluruh mengenai pentingnya transparansi informasi dalam pelaksanaan dan pengawasan program pembangunan daerah. Melalui kegiatan penyuluhan dan diskusi yang dilakukan, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai konsep asimetri informasi serta dampaknya terhadap efektivitas pengendalian pembangunan daerah.

Hasil kegiatan juga menunjukkan bahwa keterbukaan informasi memiliki peran penting dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan pembangunan. Ketika informasi mengenai program pembangunan dapat diakses secara lebih terbuka oleh masyarakat, maka masyarakat dapat berperan aktif dalam memantau pelaksanaan program serta memberikan masukan terhadap kebijakan pembangunan daerah.

Selain itu, koordinasi antar lembaga pemerintah juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas pengendalian program pembangunan daerah. Koordinasi yang baik akan memudahkan proses pertukaran informasi antar instansi serta memastikan bahwa setiap program pembangunan dapat dilaksanakan secara terarah dan terintegrasi.

Dengan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, diharapkan aparatur pemerintah daerah dan masyarakat dapat lebih memahami pentingnya transparansi informasi serta meningkatkan partisipasi dalam proses pengawasan pembangunan daerah. Dengan adanya keterbukaan informasi dan koordinasi kelembagaan yang baik, maka potensi terjadinya asimetri informasi dapat diminimalkan sehingga pelaksanaan program pembangunan daerah dapat berjalan secara lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2019. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Assauri, Sofjan. 2016. *Manajemen Produksi dan Operasi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas

Ekonomi Universitas Indonesia.

Chase, Richard B., Nicholas J. Aquilano, dan F. Robert Jacobs. 2006. *Operations Management for Competitive Advantage*. New York: McGraw-Hill.

Gaspersz, Vincent. 2012. *Production Planning and Inventory Control*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Handoko, T. Hani. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen Produksi dan Operasi*. Yogyakarta: BPFE.

Heizer, Jay dan Barry Render. 2015. *Manajemen Operasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Heizer, Jay, Barry Render, dan Chuck Munson. 2017. *Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management*. Boston: Pearson.

Krajewski, Lee J., Larry P. Ritzman, dan Manoj K. Malhotra. 2018. *Operations Management: Processes and Supply Chains*. Boston: Pearson.

Moleong, Lexy J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Nasution, Arman Hakim. 2015. *Manajemen Industri*. Yogyakarta: Andi.

Russell, Roberta S., dan Bernard W. Taylor. 2014. *Operations and Supply Chain Management*. New York: Wiley.

Slack, Nigel, Alistair Brandon-Jones, dan Robert Johnston. 2017. *Operations Management*. London: Pearson Education.

Stevenson, William J. 2018. *Operations Management*. New York: McGraw-Hill Education.

Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tjiptono, Fandy. 2016. *Manajemen Operasi*. Yogyakarta: Andi.